

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah suatu amanah yang Allah SWT titipkan sehingga harus dijaga dan dirawat dengan baik agar tumbuh kembang anak selalu terjaga. Anak merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup baik bagi manusia maupun bagi sebuah bangsa dan Negara. Indonesia sebagai Negara yang ramah anak mengatur di dalam konstitusi Indonesia, dan telah menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, penting untuk memberikan yang terbaik bagi anak demi untuk menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan hidup manusia.¹

Pengaturan hukum yang mengatur tentang anak di Indonesia sampai saat ini masih belum spesifik karena terdapat di berbagai peraturan hukum yang ada, sehingga untuk memahami hukum mengenai anak akan menjadi sulit, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengertian anak, sebagai berikut:

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Anak merupakan mereka yang belum dapat dikatakan dewasa dan belum berusia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki sebagai acuan dalam menentukan kedewasaan seseorang.

¹ R. Abdussalam & Andri Desasfuryanto, 2016, Hukum Perlindungan Anak , Jakarta: PTIK, hal 209.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Anak merupakan anak yang masih berada didalam kandungan ibunya dan sampai berusia 18 tahun.

Ungkapan anak yang belum berusia 18 tahun dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki pengertian yang sama dengan kalimat yang terdapat dalam Pasal 1 konversi tentang Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998. Sementara itu dalam mengartikan kalimat anak yang masih dalam kandungan ibunya yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Dalam hal ini maka yang dianggap kepentingan si anak menghendaki dalam Pasal 2 KUH Perdata, dapat diberikan contoh seperti yang berkaitan dengan masalah “pewarisan” atau dapat dikatakan yang menyangkut permasalahan tentang harta gono-gini yang akan diterima oleh pewaris sahny².

Dalam Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 21 tahun dan/atau belum kawin. Apabila anak telah menikah sebelum berusia 21 tahun namun kemudian cerai baik cerai hidup ataupun cerai mati oleh suami/istrinya

² J.Satrio, 1999, Hukum Pribadi, Bagian Persoon Alamiah, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.21

sebelum genap berusia 21 tahun maka ia tetap dianggap telah dewasa bukan anak-anak.

Setiap anak di dunia ini terlahir dengan hak-hak yang mereka bawa sebelum mereka lahir, sehingga hak-hak tersebut haruslah dijunjung tinggi sebagai harkat dan martabat dari anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu tanpa adanya diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan menghargai partisipasi anak.³

Berdasarkan pengertian atau definisi anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia, saat ini belum terdapat keseragaman antara satu dengan yang lainnya. Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan batas usia anak dapat dihubungkan dengan kepentingan anak itu sendiri, jika hal itu dilihat dari segi usia anak dapat dihubungkan dengan adanya kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.⁴

Diaturinya berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang dijadikan sebagai kaidah social tidak berarti bahwa pergaulan yang terjadi antar sesama manusia dan masyarakat hanya dapat diatur oleh hukum. Dalam

³ Rika Saraswaty, 2009, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.1.

⁴ I Nyoman Ngurah Suwamatha, "Kebijakan Hukum Pidana Anak Dalam Konsep KUHP 2010", Jurnal Advokasi, Vol 1, No. 1 (September 2011), hal.2

menciptakan manusia yang taat akan hukum serta bermoral dapat juga diatur oleh agama, kaidah susila, kesopanan, adat istiadat, kebiasaan, dan juga kaidah lainnya.⁵ Meskipun dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai aturan hukum dan norma lainnya, namun masih saja terjadi perbuatan yang menyimpang atau melanggar aturan dan norma hukum tersebut. Salah satu perbuatan yang melanggar aturan atau norma tersebut adalah pencabulan atau dikenal sebagai kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur.

Pencabulan atau kekerasan seksual merupakan semua bentuk ancaman dan pemaksaan yang berhubungan dengan seksual. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP. Dalam Pasal 285 ditentukan bahwa bagi mereka yang melakukan kekerasan atau mengancam untuk melakukan kekerasan dengan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk berhubungan seksual dengannya maka orang tersebut akan dihukum dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun. Sedangkan di dalam Pasal 289 disebutkan bahwa bagi mereka yang melakukan kekerasan atau mengancam untuk melakukan kekerasan dan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan terjadinya pencabulan, maka dapat dihukum karena dianggap telah merusak norma kesopanan dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun.

Menurut R.Soesilo perbuatan cabul merupakan semua perbuatan yang dianggap telah melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji

⁵ Chaidir Ali, 1972, Filsafat Hukum, Bandung: Memories Book, hal.5.

yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, contohnya ciuman, meraba kemaluan, meraba payudara wanita, dan termasuk juga persetubuhan termasuk dalam pengertian ini.⁶ Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 E mengatur mengenai larangan yang menyatakan bahwa Setiap orang dilarang untuk berbuat kekerasan atau mengancam seseorang untuk melakukan kekerasan baik dengan memaksa, menipu, maupun dengan kebohongan untuk dapat membujuk anak agar mau melakukan atau membiarkan terjadinya pencabulan”.⁷ Sebagaimana sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur terdapat pada Pasal 82 ayat (1) yang menyatakan bahwa bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai tindak pidana pencabulan yang terdapat dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).⁸

Adapun pengertian pencabulan berdasarkan perspektif hukum islam pencabulan atau perbuatan cabul merupakan perbuatan yang keluar dari jalan haq serta ketakwaan seseorang dan mengarah kepada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta tindakan tersebut berhubungan dengan perzinahan. Pada dasarnya pencabulan merupakan perbuatan manusia yang sangat sensitive untuk dibahas, karena hal ini berkaitan dengan harkat dan harga diri serta

⁶ R.Soesilo, 1996, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal demi pasal, Bogor: Politeia, hal 212

⁷ R. Abdussalam & Andri Desasfuryanto, 2016, Hukum Perlindungan Anak , Jakarta: PTIK, hal 267

⁸ *Ibid*, hal.270

kehormatan manusia.⁹ Maka dari itu pencabulan dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan berhubungan dengan seksual yang tidak sampai berhubungan kelamin. Akan tetapi jika pencabulan tersebut telah memasuki tahap berhubungan seksual, maka perbuatan tersebut merupakan perzinahan.

Allah melarang hamba-Nya untuk mendekati perbuatan yang mendekati zina seperti perbuatan pencabulan, dapat diketahui bahwa hal tersebut telah diatur secara tegas didalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Israa:32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَٰطِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”* (Qs. Al-Isra:32).¹⁰

Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

Artinya : *“ Jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (di atas kepalanya) jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya”*.

⁹ Amin Suma, 2001, Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, hal.204

¹⁰ Departemen Agama RI, 2010, Al-Qur'an dan Tajwid, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, hal.285

Dewasa ini banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual seperti pencabulan, baik itu anak sebagai korban pencabulan maupun anak sebagai pelaku pencabulan. Permasalahan anak yang terlibat dalam tindak pidana pencabulan sangatlah mengkhawatirkan, oleh karena itu dibutuhkan adanya sistem peradilan yang dapat menjamin terpenuhinya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹

Suatu pertanggungjawaban berdasarkan hukum islam, walaupun telah diatur secara tegas bahwa seseorang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak dapat bertanggungjawab atas *jarimah* yang dilakukan oleh orang lain walaupun memiliki hubungan kekeluargaan dan persaudaraan antara dirinya dan orang lain tersebut.¹² Hukum pidana islam mengatur bahwa seseorang yang belum baligh tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam hukum islam mengatur mengenai batasan seorang anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, namun tidak sedikit Fuqaha membatasi usia anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarimah* yang telah diperbuatnya yaitu apabila anak tersebut telah berusia 15 tahun. Sementara itu menurut pandangan Ahmad Hanafi berdasarkan Imam Abu Hanifah mengatur mengenai tingkat kedewasaan seseorang apabila telah berusia 18 tahun dan menurut Hadist riwayat apabila telah berusia 19 tahun.¹³

¹¹ Ibid, hal.51

¹² A. Rahman I Doi,1996, Hudud dan Kewarisan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 71

¹³ Ibid, hal. 370

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan adanya perbedaan perspektif mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh Anak Andrian Dimas Saputra Bin Budiman yang berdasarkan hukum positif Indonesia dan juga berdasarkan hukum islam yang berhubungan dengan perzinahan terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 08/PID.SUS-ANAK/2017/PN.PBR)”**

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini mengenai bagaimana pertanggungjawaban yang akan dikenakan kepada anak sebagai pelaku pencabulan, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut serta bagaimana pertanggungjawaban pidana yang akan dikenakan kepada anak tersebut berdasarkan perspektif hukum islam.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr?

- c. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku perzinahan yang dilakukan anak berdasarkan perspektif hukum islam

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kemampuan bertanggung jawab pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan.
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku perzinahan yang dilakukan anak berdasarkan perspektif hukum islam

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua pihak di kemudian hari, adapun manfaat dari penulisan skripsi, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Berdasarkan aspek teoritis, penulisan skripsi ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya pidana anak mengenai pertanggungjawaban pidana anak selaku pelaku pencabulan

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama di

kemudian hari serta sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana.

- b. Bagi masyarakat penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan serta upaya pertanggungjawaban pidananya dan diharapkan pengetahuan ini dapat membantu masyarakat dalam menghadapi serta menyelesaikan masalah hukum yang menimpanya agar terciptanya keadilan serta kepastian hukum bagi yang membutuhkan.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat uraian mengenai beberapa teori atau konsep yang berasal dari berbagai sumber literatur atau kepustakaan yang dapat mengarahkan serta memberi pedoman bagi Penulis dalam memahami permasalahan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini¹⁴

Pencabulan atau lebih dikenal dengan kekerasan seksual merupakan segala macam perbuatan yang mengandung suatu ancaman serta pemaksaan dalam bentuk seksual. Kekerasan seksual dapat pula diartikan sebagai suatu kontak seksual oleh salah satu pihak yang tidak dikehendaki.

Pertanggungjawaban pidana dilakukan apabila syarat-syarat agar dapat dipidana orang tersebut telah terpenuhi dan juga adanya kemampuan pada diri seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah

¹⁴ Absori, dkk, 2010, Pedoman Penyusunan Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal.18.

dilakukan sehingga apabila terdakwa tidak terbukti melanggar hukum maka akan dibebaskan dari tanggung jawabnya.¹⁵

Seseorang yang dikategorikan anak tidak akan dikenakan hukuman sebagaimana hukuman yang diterima oleh orang dewasa atas perbuatannya atau dalam melakukan tindak pidana, karena anak yang masih di bawah umur harus disamakan dengan orang tidak sadar atas perbuatannya atau gila sehingga anak tidak dikenakan hukuman.

Ukuran kedewasaan dalam kitab Fiqh dapat diketahui dengan adanya tanda-tanda yang bersifat jasmani, bagi perempuan ditandai dengan mulai haid atau menstruasi, sementara itu bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Ukuran kedewasaan yang diketahui saat ini berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, yaitu apabila orang tersebut telah mencapai usia perkawinan atau umur yang pada saat tersebut telah melangsungkan perkawinan. Jadi seseorang yang dikatakan anak apabila seseorang belum mengalami haid atau menstruasi bagi perempuan dan belum mengalami mimpi basah bagi laki-laki.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yang berarti penelitian yang dilakukan dengan menggali serta menelusuri berbagai kajian dengan menggunakan berbagai macam literatur (kepuustakaan).

¹⁵ Bambang Purnomo, 1996, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 54

¹⁶ Amir Syarifuddin, 2005, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, hal. 394.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas, terperinci, dan tepat tentang objek yang diteliti terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak (studi putusan nomor 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr). Data yang telah ada sebagai hasil dari penelitian tersebut dianalisis menggunakan berbagai dokumen hukum maupun literatur yang ada terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, sehingga data penelitian dalam bentuk tertulis tersebut dapat diuraikan dan memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh.¹⁷

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Data Sekunder. Data sekunder merupakan data yang penulis dapat dalam bentuk tertulis dari berbagai literatur. Data Sekunder terbagi menjadi 2 (tiga) bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:¹⁸

1. Al-Qur'an dan Hadist
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

¹⁷ Nursapia Harahap, 2014, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra', Vol. 8, No.1, Tahun 2014 (Mei, 2014), hal. 83.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Grup, hal. 181.

5. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 08/Pid.Sus Anak/2017/PN.Pbr

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu segala dokumen atau bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terkait bahan hukum primer, contohnya buku hukum, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini, Penulis melakukan penelitian dengan penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan cara mengumpulkan berbagai data dari sumber literatur yang berkaitan dengan masalah pokok yang akan menjadi objek dalam penelitian ini, karena penelitian bertujuan untuk mendapatkan data atau disebut dengan data sekunder, sehingga tanpa adanya metode pengumpulan data, seorang peneliti tidak bisa mendapatkan data yang diharapkan dan sesuai dengan kriteria data yang akan dijelaskan.¹⁹

5. Metode Analisis Data

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Data yang telah ada kemudian dianalisa dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Data yang ada dikelompokkan dari yang semula bersifat umum yang selanjutnya dikaji dan ditarik kesimpulannya yang bersifat khusus.

¹⁹ Sugiono, 2007, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta, hal.308.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi meliputi 4 (empat) bab yang berisi tentang uraian secara singkat mengenai pembahasan yang akan dibahas oleh penulis. Maka sistematika penulisan skripsi terdiri atas:

Bab I PENDAHULUAN, dalam bab ini meliputi judul yang akan penulis bahas pada bab selanjutnya yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini memuat teori-teori yang akan digunakan penulis sebagai pedoman dalam memecahkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang terdiri atas pengertian anak, tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan, perbedaan antara perbuatan pencabulan dan zina menurut hukum islam, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini memuat uraian hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang ada. Pada bab merupakan analisa terhadap pembahasan skripsi yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak(studi putusan nomor 08/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pbr), pertimbangan Hakim dalam putusan dan pertanggungjawaban pelaku perzinahan yang dilakukan anak berdasarkan perspektif hukum islam.

Bab IV Kesimpulan, dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran-saran yang berkaitan dalam penulisan skripsi.